

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sumber pendanaan pembangunan sebuah negara, diperoleh dari dua sumber yaitu pendapatan Pajak dan Non Pajak (Laporan Keuangan DJP 2016). Peran vital pajak dalam pembangunan adalah sumber pendanaan pembangunan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh pemerintah. Ironisnya sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya pajak. Karena itulah pemerintah melakukan segala upaya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak.

Di Indonesia pajak dapat terhutang kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang di distribusikan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka kemakmuran rakyat. Menurut Undang-undang yang sama, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari lima jenis pajak dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan sebelas jenis pajak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Berbagai jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, peneliti ingin mengambil Pajak Kendaraan Bermotor atau (PKB) sebagai objek penelitian. Pengambilan pajak kendaraan bermotor sebagai objek penelitian didasari oleh

menjelangnya transportasi sebagai sendi utama kehidupan masyarakat moderen. Distribusi, jasa transportasi, mobilitas harian masyarakat, dan rekreasi adalah contoh dari begitu melekatnya transportasi pada gaya hidup masyarakat modern. Berkembangnya teknologi dibidang transportasi, mulai dari efisiensi bahan bakar, bahan bakar alternatif, hingga fitur canggih ditambah, dengan harga ekonomis membuat semua kalangan dapat membeli moda transportasi seperti sepeda motor atau bahkan mobil.

Pesatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi baik roda dua maupun empat didorong oleh buruknya transportasi masa yang ada di Surakarta (Kemala, 2015). Dikutip dari website resmi DPPAD Jawa Tengah jumlah kendaraan bermotor di Surakarta yaitu 439.418 unit. Dari jumlah tersebut dapat dibayangkan berapa besar pendapatan provinsi yang bersumber dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di kota Surakarta. Dengan dasar di atas Kabid Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Badan Pengelola & Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng Edy S Bramantyo menyatakan bahwa tahun 2018 penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor naik 700 miliar dari tahun 2017.

Andaikan wajib pajak patuh dan taat untuk membayarkan kewajibannya pajaknya maka, target penerimaan terkait pajak yang telah dirancang akan tercapai. Akan tetapi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Tengah masih belum optimal. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) berada di angka 68 persen, artinya dari 100 orang yang seharusnya membayarkan pajak, sebanyak 32 orang masih tidak patuh untuk membayarkan pajaknya (Niken Apriliani, 2018). Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya inilah yang menjadi faktor utama kurang optimalnya pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Wardani & Rumiya, 2017. Kepatuhan wajib pajak berhubungan langsung dengan jumlah penerimaan pajak yang didapatkan oleh pemerintah. Semakin

patuh wajib pajak semakin besar pula pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Dampaknya langsung pada percepatan pembangunan di daerah pajak itu dipungut. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan pokok bahasan utama dari pembangunan Pemerintah Provinsi. Dalam penelitian Haryo (2003) salah satu hal yang mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak menunaikan kewajibannya adalah Tarif Pajak. Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Sri 2003:9).

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak terlalu tinggi sehingga memberatkan wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2013). Walaupun tinggi atau rendah tarif pajak merupakan opini subjektif dari masing-masing wajib pajak, tetap saja hal ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

Kewajibannya wajib pajak pasti mengharapkan kemudahan, oleh karena itu kualitas pelayanan pembayaran pajak merupakan isu penting dalam membahas kepatuhan wajib pajak. Menurut Pranata dan Setiawan, (2015), kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan Pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fuadi dan Mangoting, 2013). Petugas pajak yang berhubungan dengan pembayaran pajak, harus memiliki kemampuan teknis perpajakan, intelektualitas, disiplin, dan bermoral. Setiap sikap serta kegiatan yang dilakukan petugas pajak terhadap wajib pajak ketika

melaksanakan kewajibannya berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan (Rahayu, 2006).

Pelayanan yang cepat, akuntabel, dan mudah untuk wajib pajak tentunya membuat kesan baik. Kemudahan dalam membayarkan pajak diharapkan mampu membuat wajib pajak menunaikan kewajibannya. Akan tetapi kemudahan dan akuntabilitas terkadang masih tidak membuat wajib pajak patuh pada peraturan dan tetap tidak menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan yang bersifat hukuman pada wajib pajak yang dengan sengaja melalikan kewajiban pajaknya berupa saksi perpajakan. Sanksi merupakan regulasi yang dibuat guna meningkatkan kepatuhan dengan memberikan ketentuan- ketentuan yang cenderung memberikan beban lebih pada wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya. Menurut Ketut Evi (2013), Sanksi pajak memiliki peran penting guna memastikan wajib pajak menunaikan kewajiban pajaknya. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Adanya perbaikan dari sisi regulasi dan pelayanan perpajakan, isu yang kemudian menjadi sangat penting adalah tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan hukum. Vazquez, and Torgler (2005), mengatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya. Asumsi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan yakin bahwa iuran yang diberikan kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan Negara. Kepercayaan wajib pajak pada pemerintah dan hukum adalah hal mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan paparan di atas diambil beberapa pokok bahasan utama yang menjadi variabel penelitian ini.

Variabel Independen penelitian, mengambil empat variabel yaitu, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintahan dan Hukum. Sedangkan untuk Variabel Independennya mengambil Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Telah banyak dilakukan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak. Terinspirasi penelitian milik Apriani Purnamasari, dengan judul “Pengaruh Pemahaman, Sanksi, Kepercayaan, dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PBB-P2, kemudian dikombinasi dengan penelitian Yuni Nustini dengan judul “Determinan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor: Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”, dan Putri Aprilliyana berjudul “Pengaruh tarif pajka, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di SAMSAT Kota Surakarta”. Ketiga sumber tersebut penelitian ini mengambil judul “Studi Determinan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta”. Penelitian ini berbeda dengan tiga peneltia terdahulu karena penelitian ini tidak memakai variabel moderasi. Penelitian ini menambahkan beberapa variabel baru. Penelitian ini mencoba mengkombinasikan ketiga penelitian terdahulu, dengan tetap mengambil “Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” sebagai variabel dependen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas diambil beberapa pokok permasalahan utama yang menjadi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, dengan susunan sebagai berikut :

1. Menganalisis tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Menganalisis sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Menganalisis tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Hasil peneliti ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman penulis terkait perpajakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

2. Bagi Instansi yang Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pengambilan keputusan setrategis guna memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan, terutama di sektor Pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan dan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

E. Sistematika Penulisan

Bab Satu penelitian ini menjelaskan uraian-uraian isu penelitian dan permasalahan yang timbul. Masalah tersebut yang kemudian mendorong penelitian ini. Isu yang diambil dalam penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu penelitian ingin menganalisis faktor apa yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Isi dari bab satu penelitian ini meliputi Pendahuluan, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab dua penelitian ini menguraikan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab dua juga dicantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik utama penelitian. Bab dua juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Didalam kerangka pemikiran tersebut dijelaskan mengenai variabel independen dan variabel dependen dari penelitian ini.

Bab Tiga Penelitian ini memaparkan metode penelitian. Metode-metode penelitian tersebut meliputi variabel penelitian dan definisi operasionalnya, penentuan

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab empat ini memaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. Dalam bab empat dicantumkan pula pembahasan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan. Uraian tersebut kemudian dibandingkan dengan data hasil analisis pada penelitian ini. Bab lima penelitian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.